

ABSTRAK

Pengertian pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Bagi pekerja perempuan yang belum berkeluarga, masalah yang timbul pasti berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum dari kondisi objektif tidak ada perbedaan-perbedaan. Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pekerja/buruh perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan perlindungan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi tenaga kerja wanita di Kota Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan pemerintah pada tenaga kerja wanita di Kota Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang harus dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hambatan terkait pelaksanaan perlindungan tenaga kerja wanita di Kota Semarang.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara . Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan adalah Pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang sudah dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, Kendala yang ditemui oleh pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja perempuan diantaranya adalah kendala intern (dalam) pemerintah itu sendiri diantaranya pelaksanaan pengawasan keselamatan tenaga kerja wanita yang disebabkan pihak perusahaan tidak terbuka dengan data pekerja wanitanya, kemudian jam waktu pekerjaan tenaga kerja perempuan sama dengan jam kerja tenaga kerja laki-laki, serta aturan dari waktu cuit jika tenaga kerja wanita itu sedang hamil, Solusi yang dilakukan untuk menjawab kendala pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja perempuan adalah menambahkan Sumber daya manusia (SDM) di dinas ketenagakerjaan

Kata Kunci : Perlindungan, Tenga kerja Wanita

ABSTRACT

Understanding work in general is defined as an active activity carried out by humans. For women workers who are not yet married, the problems that arise must be different from those who are married, which are more subjective, although in general from objective conditions there are no differences. Correct attention for the government and society towards women workers / workers.

The purpose of this study was to find out and analyze how the protection carried out by the government in protecting female workers in the city of Semarang, to find out and analyze the obstacles found in the implementation of government protection for female workers in the city of Semarang, to find out and analyze solutions what must be done by the Semarang City Government to overcome obstacles related to the implementation of the protection of women workers in the City of Semarang.

The method used by the researcher is a sociological juridical approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews. And secondary data is obtained from literature studies.

The results of the study the authors get answers from the formulation of the problem is the implementation of protection carried out by the Semarang City government has been carried out in accordance with the legislation concerning labor, Constraints encountered by the Semarang City government in the implementation of supervision and protection of female workers include internal constraints. The government itself includes the implementation of supervision of the safety of women workers, because the company is not open to the data of women workers, then the hours of work for women workers are the same as the hours of work of men, as well as the rules of the time of work if the woman is pregnant , The solution that was made to answer the constraints of the implementation of supervision and protection of female workers was to add human resources (HR) in the employment service

Keywords: Protection, Women's Employment